

Meneropong Arah Kabupaten Cilacap 2027: Analisis RKPD dan Potensi Ekonomi Daerah

Bedah Peraturan Bupati Cilacap Nomor 7 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

Penulis: Tim Redaksi & Analisis Ekonomi Saksi Publik

Tanggal Terbit: Juli 2026 | Perspektif: Kebijakan Publik & Ekonomi

CILACAP, SAKSI PUBLIK — Pemerintah Kabupaten Cilacap secara resmi menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD 2027 tidak sekadar formalitas birokrasi, melainkan fondasi utama dan acuan mengikat dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2027. Berikut adalah rangkuman komprehensif dan analisis mendalam mengenai peta jalan pembangunan Cilacap pada tahun 2027.

REGULASI DASAR

**Perbup No.
7/2026**

Ditetapkan 9 Juli 2026

TEMA UTAMA 2027

**Kemandirian
Pangan**

Mendorong potensi ekonomi lokal

LUAS WILAYAH

2.438,93 km²

Kabupaten Terluas di Jateng
(6,5%)

STATUS STRATEGIS

Pusat PKN

Pusat Kegiatan Nasional
(RTRWN)

1. Rangkuman Eksekutif RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2027

RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045. Tahun 2027 menandai tahapan penting, yaitu tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dan tahapan awal RPJPD 2025–2045.

TEMA PEMBANGUNAN UTAMA TAHUN 2027

"Mengembangkan potensi ekonomi yang mampu mendorong kemandirian pangan menuju Cilacap Maju dan Besar"

A. Kedudukan Hukum dan Fungsi Operasional RKPD

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 7 Tahun 2026, RKPD Tahun 2027 berfungsi secara langsung sebagai pedoman wajib dalam:

- Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027.
- Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama DPRD Kabupaten Cilacap.

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

B. Karakteristik Geografis & Kewilayahan Utama

Dengan luas mencapai 2.438,93 km² (termasuk Pulau Nusakambangan seluas 115 km²), Kabupaten Cilacap terbagi secara administratif ke dalam 24 Kecamatan, 269 Desa, dan 15 Kelurahan. Kabupaten Cilacap memiliki topografi yang sangat kontras, mulai dari dataran tinggi/perbukitan di wilayah barat-utara (seperti Dayeuhluhur dengan ketinggian 198 mdpl) hingga wilayah pesisir serta laguna perairan di wilayah selatan (Kampung Laut dengan ketinggian 1 mdpl).

C. Potensi Lahan dan Sektor Unggulan

Dari total luas daratan 213.849 Ha, sektor pertanian memegang porsi dominan dengan total lahan pertanian mencapai 171.464 Ha. Porsi tersebut terdiri dari 66.211 Ha lahan sawah (44.879 Ha irigasi teknis/semi teknis dan 20.450 Ha sawah tadah hujan) serta 104.909 Ha lahan pertanian bukan sawah (perkebunan, tegalan, dan hutan rakyat). Potensi ini didukung oleh keberadaan 5 Cekungan Air Tanah (CAT) utama (CAT Majenang, Sidareja, Nusakambangan, Cilacap, dan Kroya) yang menjamin ketersediaan air pasokan pertanian dan industri.

2. Analisis Kebijakan & Gambar Peta Pembangunan Cilacap 2027

Melalui penelaahan mendalam terhadap Perbup No. 7 Tahun 2026, redaksi *Saksi Publik* mencatat sejumlah pilar utama yang akan membentuk wajah perekonomian dan pembangunan Kabupaten Cilacap pada tahun 2027:

1. Transformasi Menuju Sentra Kemandirian Pangan Jawa Tengah

Penetapan tema kemandirian pangan bukan tanpa alasan. Dengan ketersediaan lahan sawah irigasi seluas 44.879 Ha dan komitmen perlindungan melalui Peraturan Bupati tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Cilacap diposisikan sebagai lumbung pangan utama. Pada tahun 2027, alokasi anggaran dan program prioritas diarahkan pada modernisasi jaringan irigasi, optimalisasi Indeks Pertanaman (IP), penguatan kelembagaan petani, serta modernisasi sarana pascapanen guna menahan laju konversi lahan akibat industrialisasi.

2. Konsolidasi Cilacap sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) & Hub Industri

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Cilacap ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan kawasan *hinterland* (penyangga) industri. Peta jalan 2027 memperlihatkan akselerasi proyek-proyek strategis seperti keberlanjutan investasi Biorefinery, operasionalisasi PLTU, pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan, serta penyiapan konektivitas tol (Gedebage–Cilacap, Cilacap–Pejagan, Cilacap–Yogyakarta) dan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS). Cilacap bertransformasi menjadi koridor industri maritim dan energi berdaya saing tinggi.

3. Integrasi Kebijakan Daerah dengan Asta Cita dan Program Provinsi

RKPD 2027 secara teknokratis dirancang untuk menyinkronkan kebijakan lokal dengan 8 Misi Nasional (Asta Cita), Program Hasil Terbaik Cepat (Quickwins), serta 136 Program Daerah Provinsi Jawa Tengah (termasuk 35 program delegatif provinsi). Integrasi ini menjamin bahwa belanja daerah APBD 2027 Cilacap akan berfokus pada penurunan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, perbaikan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Fokus Pembangunan	Program Utama / Arahan Kebijakan	Dampak & Orientasi APBD 2027
Kemandirian Pangan	Rehabilitasi jaringan irigasi, penataan LP2B, bantuan sarpras pertanian, dan penguatan rantai pasok lokal.	Peningkatan produktivitas padi, stabilitas harga pangan, dan peningkatan kesejahteraan petani lokal.
Infrastruktur & PKN	Peningkatan kualitas jalan kabupaten, pendukung jalan tol, fasilitasi Pelabuhan Tanjung Intan, & kawasan industri.	Akselerasi arus logistik nasional, penyerapan tenaga kerja, dan daya tarik investasi PMDN/PMA.
Kesejahteraan Sosial	Penanganan stunting, perbaikan RTLH, optimalisasi JKN PBI Pemda, dan pembenahan sanitasi/air bersih.	Penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pemerataan kualitas hidup.
Ketahanan Lingkungan	Pengelolaan sampah terpadu, konservasi kawasan resapan air/CAT, dan pengurangan risiko bencana (banjir/tsunami).	Menjaga keberlanjutan ekologis di tengah pesatnya industrialisasi pesisir.

3. Catatan Kritis & Rekomendasi Media Saksi Publik

Sebagai media publikasi nasional yang menjunjung tinggi fungsi pengawasan publik (*public watchdog*), *Saksi Publik* memberikan beberapa catatan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap dan DPRD Kabupaten Cilacap menjelang pembahasan KUA-PPAS 2027:

CATATAN PENGAWASAN APBD 2027

1. **Mencegah Konflik Guna Lahan:** Pemerintah daerah harus konsisten mempertahankan kawasan LP2B dari ancaman ekspansi kawasan industri dan permukiman, agar komitmen kemandirian pangan tidak sekadar slogan.

2. **Prinsip Money Follows Program Priority:** Mengingat keterbatasan alokasi belanja daerah, penganggaran APBD 2027 harus secara ketat difokuskan pada program super-prioritas yang berdampak langsung pada penurunan pengangguran dan kemiskinan.

3. **Mitigasi Bencana Industri dan Alam:** Sebagai wilayah rawan bencana alam (gempa/tsunami/banjir) sekaligus pusat industri berat/migas, infrastruktur keselamatan dan daya dukung lingkungan hidup wajib menjadi porsi prioritas belanja belanja publik.

Referensi & Sumber Dokumen Resmi:

- * Peraturan Bupati Cilacap Nomor 7 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2027 [gmail search query: "PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027"].
- * Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029.
- * Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045.